



## Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAN  
PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL ASLI KUANTAN  
SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 61 TAHUN 2019 (Di Desa Langsung Hulu**

**Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten  
Kuantan Singingi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**SYAHRI HANDRIK JP**  
**NIM. 11627103870**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2019 (di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)"*** yang ditulis oleh:

Nama : Syahri Handrik jp

NIM : 11627103870

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Feb 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr ABU SAMAH, MH.**

NIP. 130217086

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 (Di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)"* yang ditulis oleh :

Nama : Syahri Handrik Juni Pratama  
 NIM : 11627103870  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 26 Maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE, M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Lyssa Angraini, SH., MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

.....  
 .....  
 .....

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

.....

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005





## ABSTRAK

Olahraga tradisonal merupakan permainan rakyat yang berkembang sejak zaman nenek moyang yang memiliki nilai kultur budaya yang menjadi khas suatu negara. Permainan tradisonal ini perlu dijaga kelestariannya. tugas Dinas Pemuda dan Dinas Pemuda Dan Olahraga dalam melakukan pembinaan dan pengembangan serta pelestarian olahraga tradisonal asli Kuantan Singingi Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019. Namun upaya dari tugas dari Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga tradisonal yang masih kurang dalam pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional asli kuantan singingi.

Adapun masalah yang timbul dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melakukan pembinaan dan pengembangan dan pelestarian olahraga asli kuantan singingi di tingkat sekolah dasar studi kasus di desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten kuantan Singingi, Serta apa faktor yang menghambat Dinas Pendidikan dan pemuda dan olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional asli Kuantan Singingi di Desa Langsung Hulu kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan secara observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Analisis yang digunakan adalah kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tugas Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga dalam melakukan Pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisonal asli kuantan singingi berdasarkan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Di Sekolah Dasar Negeri 020 dan Sekolah Dasar Negeri 019 tidak terlaksana dengan baik. Di antaranya adalah mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisonal melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sebagai mewujudkan pelestarian olahraga tradisonal asli kuantan singingi. Agar proses pembinaan pengembangan, dan pelestarian olahraga tradisonal terlaksana dengan baik maka sebaiknya guru olahraga ikut serta dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Adapun faktor penghambat pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisonal asli Kuantan Singingi diantaranya adalah; (i) faktor kukum; (ii) faktor sarana dan fasilitas; (iii) faktor masyarakat; dan (iv) faktor kebudayaan.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. Atas ridho-Nya yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terhingga kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tentang **“Tugas Dinas Pendidikan Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 (Di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi ini merupakan suatu kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dalam perkuliahan dan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih

yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Teguh Pranoto dan Ibunda Afri yanti, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa dan selalu berdoa untuk kesehatan, kesuksesan dan memberikan dorongan motivasi. Serta Paman Adi Zarman Tante Saffrina, dan penulis serta yang terkhususkan untuk Adik Kandung Saya yaitu Syahri Dicky Gus Pianto, Syahri Santriawan, Syahri Pramita Raya, Syahri Habib Gus Tomi yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Plt Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr, H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan .
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Dr, H Magfirah, MA selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Dr. Abu Samah, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Bapak Masrul Hakim, M.Pd.I sebagai Kepala Plt Disdikpora kuansing, Bapak Surya Kurniawan, S.H sebagai Kepala Seksi Keolahragaan Disdikpora Kabupaten Kuantan Singingi, dan Bapak Marjoni M.Pd Sebagai Kepala Sekolah Dasar SDN 019 Desa Langsung Hulu, Bapak Jumakir Sebagai Kepala Sekolah SD 020 Desa Langsung Hulu serta Bapak Yasri sebagai Guru Pendidikan Jasmani SDN 019 Desa Langsung Hulu yang telah memberikan waktu luangnya dan kemudahan, kepada penulis dalam pengambilan data dan Informasi dalam penulisan Skripsi ini.
9. Kepada Sahabat Sahabat Saya Joni Arisman, Mahfud Efendi, dan teman yang telah memberikan semangat kepada saya Ahmad Choyri, Azizan Syah Nst, Brahma Dika BK, Selviana Dewi, Muhammad Riski, M Hifzilah, Ozi Fiki M, Rasmi Saputra, Sony Al-ihsan M. Suradi Rio.
10. Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2016, IH A dan HTN A Serta Teman-teman KKN 2019 Desa Dayo penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua peran kalian dalam membantu penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, Juli 2021

**SYAHRI HANDRIK JP**  
**NIM. 11627103870**

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi .....	19
B. Sejarah Desa Langsat Hulu .....	22
C. Profil Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga .....	26
D. Visi dan Misi .....	31
E. Struktur Organisasi .....	32
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Tata Negara .....	34
1. Prinsip Negara Hukum .....	34
2. Konsep Negara Hukum .....	35
3. Negara Hukum Indonesia .....	37
B. Teori Otonomi Daerah .....	39
1. Pengertian Otonomi .....	39
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah .....	40
3. Asas-asas Otonomi Daerah .....	42
4. Hak dan Kewajiban Daerah .....	45



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pemerintahan Daerah .....	48
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	48
2. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	50
3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Indonesia .....	51
4. Kewenangan Pemerintah .....	56
5. Kewenangan Pemerintah Daerah .....	58
D. Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi .....	59

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan Dinas Pemuda Olahraga dalam pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Olahraga Tradisional asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 .....	63
B. Faktor Yang Menghambat Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda Dan Olahraga dalam Pembinaan dan Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

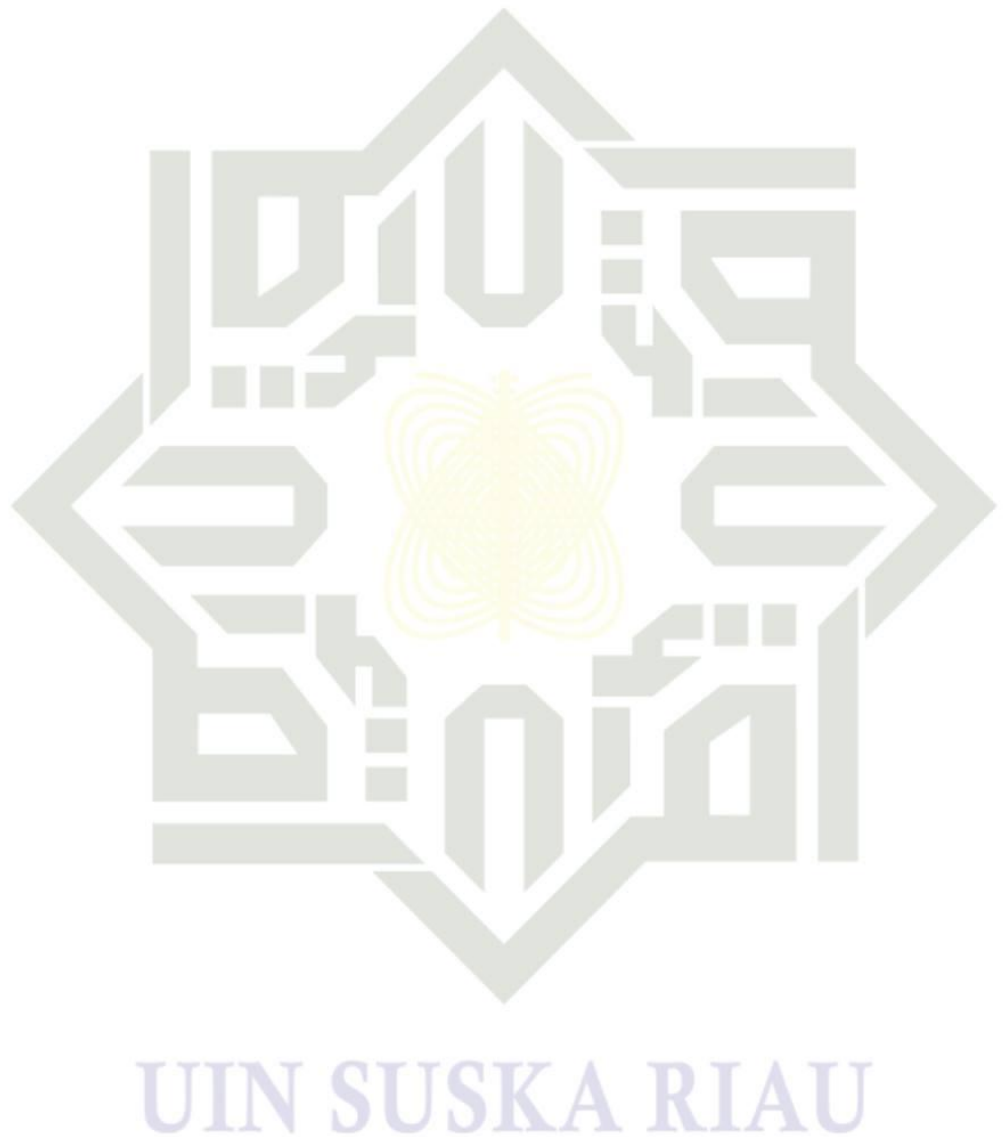
UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	14
Tabel 2.1	Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	27







1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan rentang kendali yang cukup luas, agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ada baiknya menggunakan sistem desentralisasi. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menggunakan sistem desentralisasi, berupa penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.<sup>1</sup> Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Oleh karena itu Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya.<sup>2</sup>

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan dalam pelaksanaan pemerintahan desentralistik. Dalam pasal 1 angka 6 UU No.23/2014 menyebutkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan negara republik Indonesia.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Yusnani Hasyizoem, *Hukum pemerintahan daerah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.5

<sup>2</sup> A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), h. 1

<sup>3</sup> Yusnani Hasyizoem, *Op.cit*, h.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka haruslah menerapkan sistem otonomi yang bertanggung jawab, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah yang harus sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan otonomi daerah tersebut tentunya seorang kepala daerah harus ada yang namanya tugas dan kewajiban lainnya sebagai kepala daerah. berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi tersebut maka ditentukan oleh kemampuan kepala daerah dalam membimbing, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi kearah pencapaian tujuan. demikian pentingnya pemimpin dalam organisasi, sehingga dikatakan kepemimpinan adalah sarana pencapaian tujuan.

Walaupun tugas kepala daerah cukup lengkap dan diwarnai oleh karakteristik organisasi, namun terdapat tugas dan fungsi kepala daerah yang bersifat universal karena selalu dilakukan oleh setiap pemimpin organisasi, yaitu mengambil kebijaksanaan, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, mengevaluasi tujuan organisasi dengan mengantisipasi perubahan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, mengkoordinasikan unit-unit kerja dan mengambil keputusan.

Sejarah bangsa indonesia olahraga membuktikan bahwa olahraga tidak saja peningkat pola hidup sehat dan prestasi, tetapi sekaligus sebagai media

---

<sup>4</sup> Ibid, h.18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pejuangan dan sarana menyatukan bangsa yang besar ini. Prestasi olahraga menjadi menjadi salah satu indikasi pembangunan nasional sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga harus di tempatkan sebagai alat pemersatu bangsa.<sup>5</sup> suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mampu membangun aspek kehidupannya, diantaranya adalah nasionalisme, sumber daya manusia dan kedisiplinan.

Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia bukan lagi menjadi rahasia umum, olahraga menjadi suatu kegiatan rutinitas yang mampu membuat tubuh seseorang menjadi sehat dan bugar. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan nasional. Yang menyatakan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara serta meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, mutu manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.<sup>6</sup>

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Perkembangan penduduk kuantan singingi ditandai dengan banyak nya etnis yang masuk seperti minang, jawa, batak dan china. Daerah yang menjadikan tempat tinggal etnis-etnis tersebut secara perlahan menumbuhkan keberagaman budaya dan akan berkembang dengan masuknya

<sup>5</sup> Jerry Indrawan, *Olahraga sebagai sarana pemersatu bangsa dan upaya perdamaian* universitas pembangunan nasional vetrean jakarta.h.69

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

etnis-etnis tersebut. Dari berbagai banyaknya adat istiadat dan budaya kabupaten kuantan singingi memiliki olahraga tradisional, Olahraga tradisional yang ada di Kabupaten kuantan Singingi diantaranya adalah pacu enau, sepak rago/sepak takraw tinggi kopah, silat/pendekar, pacu perahu.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2005 tentang keolahragaan Nasional pasal 13 ayat 1 dan 2 menjelaskan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan ke olahragaan di daerah. Menurut ajun khamdani pemerintah harus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang olahraga tradisional.<sup>7</sup>

Pembinaan dan pengembangan pada dasarnya adalah upaya pendidikan baik secara formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu dasar kepribadian seimbang utuh dan selaras, dalam rangka memberikan pengetahuan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesama maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Fela Sofiana "Permainan Tradisional Kuntulan di Desa kalipancur Kecamatan Blado Kabupaten BatangJawa Tengah" jurnal *Of Sport Sciences and fitness* h.4

<sup>8</sup> Komarudin, "Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Sistem Pembangunan Dan Pembinaan Olahraga Di Indonesia" Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia, vol. 11 No. 1, april 2014 h.41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menurut lutan pembinaan adalah sebagai usaha mengorganisasi atau cara untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut widowati yaitu: untuk menjalankan suatu program pembinaan harus didukung dengan pemain, pelatih dan orang tua yang sepakat tentang program pembinaan yang dijalankan oleh pelatih.<sup>10</sup> Agar program pembinaan pelatih ini dapat berjalan, maka diperlukannya suatu wadah pembinaan olahraga yang bertujuan agar atlet pelajar yang potensial dapat dibina secara terpusat sehingga proses latihan agar lebih intensif dan pembinaan akademiknya tidak tertinggal.

Olah raga tradisional atau sering disebut dengan permainan tradisional telah berkembang sejak zaman nenek moyang olah raga ini berasal dari permainan rakyat yang dilestarikan secara turun temurun.<sup>11</sup> Adapun manfaat yang diperoleh dari olahraga tradisional antara lain: meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru dan pembuluh darah, meningkatkan kekuatan otot dan kepadatan tulang, meningkatkan kelenturan (fleksibilitas) pada tubuh sehingga dapat mengurangi cedera, meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal, mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit, meningkatkan sistem hormonal melalui peningkatan sensitifitas hormon terhadap jaringan tubuh, meningkatkan aktivitas sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit melalui peningkatan pengaturan kekebalan tubuh.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Jamarudin, "Kebijakan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal publihu is licensed under a creative commons attribution. h.4

<sup>10</sup> Anisa Ulhasni, Pembinaan olah raga tradisional silat sikoka harimau damam, jurnal paitot volume 3 No. 1, 2020 h.85

<sup>11</sup> Ajun Khamdani, Olahraga Tradisional Indonesia (Kalimantan Barat, PT Maraga Borneo Tarigas, 2018), h.9

<sup>12</sup> Oktaria Kusumawati "Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Peningkatan Kemampuan Gerak Dasar Siswa Sekolah Dasar Kelas Bawah" jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar, vol.4 No.2 oktober 2017, h.133-134

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Permainan tradisional mempunyai masa berjaya, yakni masa-masa permainan tradisional masih sering di mainkan oleh siswa siswa sekolah dasar yakni diperkirakan pada tahun 2005 kebawah. Umumnya permainan tradisional dimainkan pada saat sore di halaman kampung.<sup>13</sup>

Permainan tradisional ini sudah mulai akan ditinggalkan terkait pengaruh budaya asing, anak-anak dizaman modern ini lebih mementingkan dengan memainkan *computer*, *Playstation*, dan *gadget* nya masing masing. Pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional kepada anak-anak dan pemuda ini sangatlah penting terutama di daerah- daerah yang memiliki banyak warisan permainan peninggalan nenek moyang. karena olahraga tradisional ini bisa menjadi modal ketahanan budaya untuk menghadapi serbuan budaya global. Hal ini terjadi di kalangan masyarakat dan anak usia SD di Desa/kelurahan Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Namun kebudayaan yang begitu banyak ini mulai tersisih oleh budaya asing yang mulai masuk dengan cepat dan menyisihkan kebudayaan kita. Didalam kebudayaan tradisional terdapat unsur unsur budaya, salah satunya permainan tradisional anak anak yang lambat laun terlupakan oleh zaman. Permainan yang telah ada sejak dahulu kini mulai menghilang disebabkan adanya pengaruh dari permainan bangsa asing yang membuat anak anak lupa akan permainan tradisional tersebut.

---

<sup>13</sup>Asriansyah *Pengembangan Permainan Tradisional Untuk Melestarikan Budaya Bangsa Melalui Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar*, Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 2018 h.83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melihat kondisi tersebut, sudah seharusnya pemerintah melaksanakan tugasnya yang untuk melakukan pembinaan terhadap kegiatan olahraga tradisional dalam rangka melestarikannya dengan cara memasukan pembinaan olahraga tradisional tersebut kedalam progam Dinas pendidikan dan Dinas Pemuda dan olahraga asli kabupaten kuantan singingi.

Berdasarkan Peraturan Bupati kuantan Singingi No 61 tahun 2019 menyatakan bahwa perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap olahraga tradisional Kuantan Singingi pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem ke olahraga nasional, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang bersifat tradisional dilakukan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf b peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, bahwa dalam rangka mewujudkan misi ke 6 Kabupaten Kuantan Singingi yaitu melestarikan nilai budaya.

Dalam pasal 4 peraturan Bupati Kuantan Singingi No 61 tahun 2019 yang berbunyi: Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan pembinaan dan

<sup>14</sup> Peraturan Bupati kuantan singingi Nomor 61 tahun 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengembangan olahraga serta melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah dibidang olahraga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kemudian dalam pasal 5 peraturan bupati kuantan singingi tentang kewenangan Dinas pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga pemerintah daerah meliputi: pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan melalui:

1. pembinaan dan olahraga tradisional asli kuantan singingi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama
2. penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional pada kegiatan kegiatan hari hari besar
3. bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan daerah.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian olahraga tradisional asli kuantan singingi.

Tanggung jawab pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

1. Pelaksanaan Kebijakan
  2. Kordinasi Pembinaan dan Pengembangan dan
  3. Pelaksanaan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan
- adapun jenis olahraga tradisional asli kuantan singingi yaitu:
- a. Pacu Enau
  - b. sepak rago tinggi kopah
  - c. silek pangean
  - d. pacu perahu

<sup>15</sup>*Ibid.*, lihat pasal 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Namun kenyataannya berdasarkan survei bahwa ditingkat sekolah dasar (SDN 019) dan (SDN 020 ) didesa/kelurahan Langsung Hulu, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Upaya Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas pembinaan masih kurang efektif. Dan belum efisien seperti: dalam pembinaan olah raga pacu enau, sepak rago tinggi, dan pacu perahu,. Selain itu juga masih terbatas pada minat dan bakat yang belum terwadahi, dan masih kurang sarana dan prasarana dibidang olah raga.

Penjelasan diatas dapat diperkuat dengan jelas oleh bapak yasri yang merupakan guru olahraga disalah satu SD didesa tersebut, mengatakan bahwa:

*Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dispenpora menjadi ketidaktahuan , maka keadaan seperti itu mengakibatkan beberapa sekolah sekolah dasar , belum mengetahui peraturan tersebut begitu pula dengan masyarakat setempat.*

Akhir akhir ini pelestarian olahraga Olahraga telah mendapatkan kekurangan respon dari siswa siswi sekolah dasar sehingga terjadinya kurangnya pengembangan pelestarian budaya seperti pacu enau, sepak rago tinggi kopah, silek pangean, dan pacu perahu.

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan, pengembangan dan pelestarian, olah raga tradisoanal asli kuantan singingi di tingkat Sekolah Dasar maka perlu diadakan penelitian dengan judul “Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## B. Batasan Masalah

Agar tidak lari atau melenceng dari pembahasan, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas Tugas Dinas pendidikan dan Dinas Pemuda olahraga dalam melakukan Pembinaan dan pengembangan, pelestarian olah raga tradisional asli kuantan Singingi berdasarkan peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2019 dalam pasal 4 dan 8 ayat 3 (di Desa Langsung Hulu kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga dalam Pembinaan dan pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Kabupaten Kuantan Singingi Di Desa Langsung Hulu kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor yang menghambat Dinas Pendidikan dan pemuda dan olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional asli Kuantan Singingi Di Desa Langsung Hulu kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian.<sup>16</sup> Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional berdasarkan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 asli di Desa Langsung hulu kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Dinas Pendidikan dan pemuda dan olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional asli Di Desa langsung Hulu kecamatan sentajo raya kabupaten Kuantan Singingi

Manfaat Penelitian Penulis juga ingin mencapai manfaat baik bagi penulis maupun bagi orang lain yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan dan pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional berdasarkan peraturan Bupati No 61 tahun 2019 kabupaten kuantan singingi

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dan pembaca
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat.

<sup>16</sup> Indra, dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2014), h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.
  - d. Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
3. Secara Akademis
- a. Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah dalam lingkup Hukum Tata Negara kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>17</sup> Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan Hukum Sosiologis, dengan cara melakukan observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket dalam pengumpulan data. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan lokasi terletak di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Dinas pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga kabupaten kuantan singingi, kepala Seksi Bidang Olahraga, dan kepala sekolah SD dan Guru pendidikan jasmani. yang berada di Desa/kelurahan Langsat Hulu, Kecamatan Sentajo raya, Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang menjadi Objek dari penelitian ini adalah Tugas ataupun wewenang dalam peraturan bupati tentang Pembinaan, pengembangan, pelestarian olahraga tradisional yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Dinas pemuda dan Olahraga pada tingkat Sekolah Dasar di Desa Langsat Hulu kecamatan Sentajo Raya Kabupaten kuantan singingi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>19</sup>

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>20</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>21</sup>

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Nama Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas pendidikan dan Dinas pemuda dan Olahraga dan kepala seksi Bidang Keolahragaan	20 orang	2 orang	10%
2	Kepala sekolah	2 orang	2 orang	100%
3	Guru Sekolah Dasar Negeri 019 dan Sekolah Dasar Negeri 020 Desa Langsung Hulu	16 orang	2 orang	12%

Aparatur terdiri dari 1 orang Kepala Dinas pendidikan dan Dinas pemuda olah raga, 1 orang kepala seksi olahraga kabupaten kuantan

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2011),

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 124

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

singingi. 2 orang kepala sekolah dasar negeri 019 dan sekolah dasar negeri 020 di Desa/kelurahan Langsat Hulu. Dan Guru 1 orang guru olahraga sekolah dasar negeri 020 Desa Langsat Hulu. Teknik dan cara pengambilan sampel dapat digunakan dengan beberapa cara yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 karakter sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Besar populasi harus jelas dan diketahui peneliti
- 2) Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu
- 3) Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel.

#### 5. Jenis Dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.<sup>23</sup> Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan sebagai obyek penulisan. Dengan cara mewawancarai yang di tujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

##### b. Data Skunder

Data sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 99.

<sup>23</sup> Pieter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

<sup>24</sup> Zainudin Ali *Op.Cit.*, h.10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut.

### a. Pengamatan (*Observation*)

yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>25</sup>

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>26</sup> Peneliti melakukan percakapan kepada kepala Dinas pendidikan, kepala seksi olahraga, kepala sekolah SD Negeri 019 dan SD Negeri 020, dan Guru olahraga SD Negeri 019 untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti. .

## 7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkan apa yang telah dinyatakan oleh

<sup>25</sup>Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114

<sup>26</sup>Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 183

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku yang nyata, peneliti menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, terbagi dalam:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, metode penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu Di Desa Langsung Hulu kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang teori teori mendasar tentang Hukum Tata Negara, Teori Otonomi Daerah Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintahan, faktor yang menjadi penghambat dengan Tugas Dinas pendidikan dan Dinas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Olahraga dalam melakukan Pembinaan Olahraga Tradisional Asli Kuantan singingi.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga dalam pembinaan, pengembangan, dan pelestarian olahraga tradisional asli kuantan sinngingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2019 di Desa Langsung Hulu kecamatan Sentajo Raya Kabupaten kuantan singingi
- B. Faktor yang menghambat Dinas Pendidikan dan pemuda dan olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional asli kuantan Singingi di Desa Langsung Hulu kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi

## BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini tentang kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

##### 1. Geografi Dan Iklim

Secara astronomis, Kuantan Singingi terletak antara 0.00-1.00 Lintang Selatan dan 101.02-101.55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas : Utara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Selatan Provinsi Jambi, Barat Provinsi Sumatera Barat, Timur Kabupaten Indragiri Hulu.<sup>29</sup> Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan Yaitu Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung Toar, Pucuk Rantai, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Sentajo Raya, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Cerenti, dan Inuman.<sup>27</sup>

Jarak antar Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan :

- a. Teluk Kuantan – Lubuk Jambi : 22 Km
- b. Teluk Kuantan – Lubuk Ambacang : 33 Km
- c. Teluk Kuantan – Kampung Baru : 10 Km
- d. Teluk Kuantan – Pangkalan : 70 Km
- e. Teluk Kuantan – Muara Lembu : 35 Km
- f. Teluk Kuantan – Koto Baru : 52 Km
- g. Teluk Kuantan – Koto Sentajo : 8 Km

<sup>27</sup> Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka Kuantan Singingi *Regency In Figures* 2019, (Kuansing, BPS, 2019), h. 3-5

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Teluk Kuantan – Benai : 10 Km
- i. Teluk Kuantan – Baserah : 36 Km
- j. Teluk Kuantan – Koto Rajo : 45 Km
- k. Teluk Kuantan – Pangean : 30 Km
- l. Teluk Kuantan – Perhentian Luas : 48 Km
- m. Teluk Kuantan – Cerenti : 19 Km
- n. Teluk Kuantan – Inuman : 47 Km

Wilayah kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya adalah beberapa kecamatan di daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabuapten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimal berkisar antara 32,60C-36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,2 0C – 220C. Curah hujan pada 2018 berkisar antara 139,80 – 463,90 mm pertahun.<sup>28</sup>

#### 2. Pemerintahan

Kabupaten Kuantan Singigni merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan beribukota di Taluk Kuantan. Pada awal pembentukannya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 (enam) kecamatan, kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan pada tahun 2002. Pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012

<sup>28</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan di Kabupaten kuantan Singingi di mekarkan kembali menjadi 15 kecamatan hingga saat ini.<sup>29</sup>

Dinas daerah terdiri Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Informasi, dan Komunikasi, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan, Dinas Pasar, Kebersihan dan pertanaman, pada tahun 2001 saat awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 (enam) kecamatan definitif dan 6 kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa definitif dan satu desa persiapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif. Pada juli 2012, terjadi lagi pemekaran. Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan menjadi 15 kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kini, Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 218 desa. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Kabupaten Kuantan Singingi yang baru terdiri atas 12 Oktober 1999, secara administratif dipimpin oleh seorang Bupati.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Badan pusat Stastitik Kabupaten kuantan Singingi 2019, h.6

<sup>30</sup> Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, *Op.Cit.*, (Kuansing, BPS, 2019), h. 6-7



## B. Sejarah Desa Langsat Hulu

### 1. Sejarah Desa

Desa Langsat Hulu adalah Desa Ekstransmigrasi pada tahun 1980 yang datang dari beberapa Daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah Asli dari Teluk Kuantan (Transmigrasi lokal) serta terdiri dari beberapa Daerah yang ada di Indonesia, yang semula terdiri dari 5 RK, kemudian setelah dirubah menjadi Dusun yang terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Ujung Datar, Dusun Kembangan, Dusun Rawa Asri dan Dusun Bukit Kemuning.<sup>31</sup>

Pada tahun 1980 nama desa langsung hulu yaitu Bina Mukti dan pada tahun 1985 hingga 1990 berubah nama menjadi Langsung Mukti dan pada tahun 1999 sampai sekarang ini menjadi desa Langsung Hulu

### 2. Geografi dan Demografi

Desa Langsung Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60°C – 36,50°C dan suhu minimum berkisar antara 19,20°C – 22,00°C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan pada bulan September s/d Februari,
- Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus.

Berdasarkan data yang tercatat bahwa Desa Langsung Hulu memiliki jumlah penduduk ± 3.157 Jiwa, memiliki 4 Dusun dan 20 RT serta 9 RW. Penduduk Desa Langsung Hulu merupakan penduduk berasal dari beberapa

<sup>31</sup> Sumber dari kantor Desa langsung Hulu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Provinsi di Indonesia. Diantanya dari Provinsi Riau, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY. Yogyakarta, Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, dan Aceh.

Desa Langsat Hulu memiliki 4 dusun yaitu:

1. Dusun Ujung Datar dengan jumlah 5 RT dan 2 RW
2. Dusun Kembangan dengan jumlah 4 RT dan 2 RW
3. Dusun Rawa Asri dengan jumlah 7 RT dan 3 RW
4. Dusun Bukit Kemuning dengan jumlah 4 RT dan 2 RW

Desa Langsat Hulu merupakan bagian desa dari Kenegerian Sentajo Atas, dimana Kenegerian Sentajo Atas memiliki 5 desa yaitu desa Geringging Baru, Geringging Jaya, Marsawa, Langsat Hulu, dan Muara Langsat. Desa Langsat Hulu terletak 20 km dari Kantor Kecamatan Sentajo Raya, dengan jarak tempuh dari desa Langsat Hulu ke Kecamatan Sentajo Raya lebih kurang 25 menit.

Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya memiliki batas administrasi diantaranya :

Sebelah Utara	: Sungai Sako Kecamatan Logas Tanah Darat
Sebelah selatan	: Marsawa Kecamatan Sentajo Raya
Sebelah Barat	: Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya
Sebelah Timur	: Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya

Dalam pengelolaan potensi daerah pada Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya memiliki potensi daerah yaitu sektor Perkebunan, seperti, Kebun Sawit, Kebun Karet, Sayur-Mayur dan Peternakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama kepala desa sejak berdirinya Desa langsung hulu kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi:

No	Nama kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Tarmuzi A Siregar	1981 S/D 1999
2.	Sudianto	2000 S/D 2001
3.	Winardi	2001 S/D 2006
4.	Winardi	2006 S/D 2012
5.	Yatino	2013 S/D 2018
6.	Imron rosadi	2018 S/D 2019
7.	Yatino	2009 S/D sekarang

Sumber: *Kantor Desa Langsung Hulu 2020*

3. Luas Wilayah Desa

No	Luas wilayah Wilayah	Jumlah
1.	Pemukiman	172 ha
2.	Pertanian sawah	- ha
3.	Ladang/tegalan	1.125 ha
4.	Hutan	- Ha
5.	Rawa-rawa	- ha
6.	Perkantoran	8 ha
7.	Sekolah	3 ha
8.	Jalan	33 ha
9.	Lapangan sepak bola	1,5 ha

Sumber: *Kantor Desa Langsung Hulu 2020*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sarana Prasarana

Adapun sarana dan prasarana desa langsung hulu kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi yaitu

No.	Prasarana	Jumlah Unit
1.	Paud	1
2.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3.	Sekolah Dasar (SD)	2
4.	Balai desa	1
5.	Masjid dan musola	12
6.	Gereja	1
7.	Lapangan bola kaki	1
8.	Lapangan bola voly	2
9.	Pasar	1
10.	Posyandu desa	2
11.	Pendopo	1

Sumber : *kantor Desa langsung Hulu 2020*

Berdasarkan daftar sarana dan prasana diatas Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya terdapat 1 unit Paud, 1 unit Taman kanak kanak (TK), 2 unit Sekolah dasar (SD), 1 unit Balai desa, 6 unit Masjid, 6 unit Mushola, 1 unit Gereja, 1 unit lapangan bola kaki, 2 unit lapangan bola voly 1 unit Pasar desa, 2 unit posyandu desa, dan 1 unit pendopo tempat perkumpulan masyarakat.

## C. Profil Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga

### 1. Latar Belakang

Kondisi Admintrasi Kuantan Singingingi Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, Oleh karena otonomi yang di canangkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada hakekatnya sebagai upaya mempercepat penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik, hal ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju suatu sistem yang memungkinkan terciptanya pemerintahan yang baik ( *Good Government* ).

Kabupaten Kuantan Singingi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kuantan Singingi merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagai Kabupaten baru, Kabupaten Kuantan Singingi terus berusaha melakukan pembangunan di daerahnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan motto “Basatu Nogori Maju”. Berdasarkan potensi yang ada didalam masyarakat, Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai visi “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera dan Agamis di Provinsi Riau*”.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi di bantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 kecamatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

Kode kec	Kecamatan	Luas km	Persentase luas (%)
10	Kuantan mudik	564.28	7.37
11	Hulu kuantan	384.40	5.02
12	Gunung Toar	165.25	2.16
13	Pucuk rantau	821.64	10.73
20	Singingi	1,953.66	25.52
21	Singingi hilir	1,530.97	20.00
30	Kuantan tengah	270.74	3.54
31	Sentajo raya	145.70	1.90
40	Benai	124.66	1.63
50	Kuantan hilir	148.77	1.94
51	Pangean	145.32	1.90
52	Logas tanah darat	380.34	4.97
53	Kuantan hilir seberang	144.29	1.49
60	Cerenti	456.00	5.96
61	Inuman	450.01	5.88
Jumlah total		7656.03	100.00

Sumber: Kantor Disdikpora Kuantan Singingi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2. Tugas Dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Bagian Kesatuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian kabupaten kuantan singingi adalah sebagai berikut :

### **a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

- 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
  - b) Perencanaan dibidang pendidikan, pemuda dan Olahraga
  - c) Pengkoordinasian dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
  - d) Pelaksanaan fasilitasi dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
  - e) Pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan pemuda dan Olahraga
  - f) Pembinaan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Pengawasan di bidang pendidikan , dan olahraga
    - h) Pengendalian dan monitoring dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
    - i) Pengevaluasian dan pelaporan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
    - j) Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Bupati dengan tugas dan fungsinya.
  - 2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang.
  - 3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri dari :
    - a) Bidang paud dan pendidikan Non Formal
    - b) Bidang Dikdas dan PK-PLK
    - c) Bidang sarana dan prasarana
    - d) Bidang pemuda dan Olahraga
- b. Sekretariat**
  - 1) Sekertariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
  - 2) Sekretaris mempunyai tugas membantu kpala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas kehumasan, keprotokolan, progam keuangan.
  - 3) Sekretaris dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pengelolaan data
  - b) Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan
  - c) Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga
  - d) Penyelenggaraan ketatausahaan
  - e) Pembinaan kepegawaian
  - f) Pengelolaan sarana dan prasarana
  - g) Penyelenggaraan urusan rumah tangga
  - h) Penyelenggaraan perjalanan dinas
  - i) Penyelenggaraan fungsi kehumasan
  - j) Penyelenggaraan keprotokoliran
  - k) Pengelola keuangan
  - l) Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- 4) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh sub bagian.
  - 5) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum
    - 2) Sub Bagian Program
    - 3) Sub Bagian Keuangan



## D. Visi dan Misi

### 1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten kuantan singingi harus dibawah dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovativ, sekaligus produktif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas pendidikan dan Dinas pemuda dan Olahraga kabupaten Kuantan singingi.<sup>32</sup>

### 2. Misi

Setelah adanya visi (tujuan yang hendak dicapai) juga di perlukan adanya suatu misi cara yang hendak dilakukan), untuk itu adapun Misi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

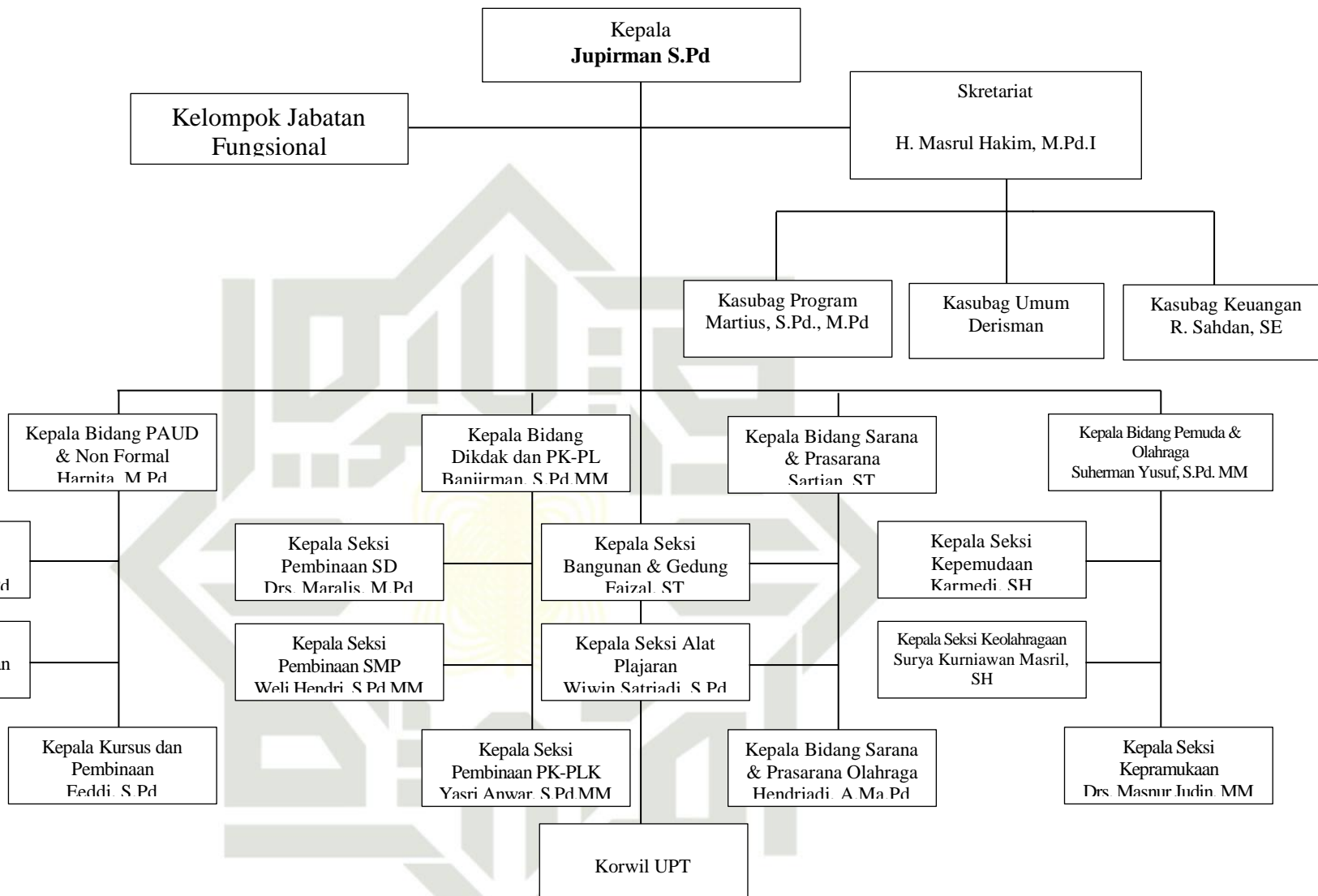
- b. Meningkatkan akses layanan pendidikan yang meluas merata dan berkeadilan
- c. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu
- d. Meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik
- f. Meningkatkan eksistensi peran pemuda yang kreatif produktif, berprestasi dan berkarakter dalam bidang olah raga dan seni
- g. Meningkatkan prestasi Olahraga yang unggul

<sup>32</sup> Observasi, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Tanggal 20 oktober 2020

<sup>33</sup> *Ibid*,

## E. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Kasubbag Umum;
  - b. Kasubbag Program;
  - c. Kasubbag Keuangan.
3. Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal, membawahkan:
  - a. Seksi Pembinaan Paud;
  - b. Seksi Pembinaan Kursus, dan Pelatihan;
  - c. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
4. Bidang Dikdas dan PK-PLK membawahkan:
  - a. Seksi Pembinaan SD;
  - b. Seksi Pembinaan SMP;
  - c. Seksi Pembinaan PK-PLK.
5. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  - b. Seksi Bangunan dan Gedung;
  - c. Seksi Alat Pelajaran;
  - d. Seksi Sarana Prasarana Olah Raga.
6. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
  - a. Seksi Kepemudaan;
  - b. Seksi Keolahragaan;
  - c. Seksi Kepramukaan





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Tata Negara

##### 1. Prinsip Negara Hukum

Sejak pertama kali kita menyatakan bernegara Republik Indonesia, kita sudah memulai dengan tidak menjalankan pasal-pasal dari UUD. pasal-pasal yang kita gunakan pasal-pasal peralihan. Sebagai contoh, presiden dan wakil presiden yang seharusnya dipilih oleh majelis permusyawaratan Rakyat menurut pasal 6 ayat (2) UUD 1945 ternyata dipilih oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) menurut pasal III aturan peralihan. Akan tetapi, hal ini bisa dimaklumi karena ini adalah sesuatu yang pertama kali didalam mengantarkan kepada adanya suatu negara.<sup>34</sup>

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, campur tangan itu diwujudkan melalui hukum tata administrasi. Perkembangan hukum dipemerintahan di Indonesia bertambah pesat dengan adanya pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan. Kehidupan nasional bangsa Indonesia meliputi kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan sosial budaya dan kehidupan pertahanan ke amanan.

<sup>34</sup> .Ni'matul Huda *Hukum Tata Negara* (Jakarta:Rajawali Pers 2016)h. 118

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai hukum publik, hukum tata pemerintahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum tata negara hal ini dapat diketahui dengan ungkapan ungkapan sebagai berikut:

- a. Kalau hukum tata negara berkenaan dengan negara dalam keadaan diam, hukum tata pemerintahan berkenaan dengan keadaan bergerak;
- b. Kalau hukum tata negara, dengan meminjam istilah ilmu kedokteran, hukum tata pemerintahan di ibaratkan dengan fisiologi (ilmu faal)
- c. Kalau hukum tata negara dengan pembuatan kebijakan, hukum tata pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan.

Sistem pemerintahan kita adalah presidensiil dalam arti kepala pemerintah adalah presiden, dan dipihak lain tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, artinya kedudukan presiden tidak tergantung kepada dewan perwakilan rakyat (alinea kedua angka V penjelasan UUD 1945).<sup>35</sup>

## 2. Konsep Negara Hukum

Pemikiran tentang konsep negara hukum telah lama dikembangkan oleh ahli filsafat dari zaman Yunani Kuno, seperti: Plato (429-374 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Pendapat dari Aristoteles memberikan pemahaman bahwa negara harus berdiri diatas hukum yang akan dapat menjarnin keadilan bagi warga negara. Dengan menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) dalam negara berarti, bahwa penyelenggaraan kekuasaan dalam negara khususnya kekuasaan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan haruslah di-dasarkan atas hukum. Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau sejalan. Oleh karena itu, pengajuan konsep negara hukum sebagai salah satu landasan hukum tata pemerintahan memegang peran yang sangat penting bukan hanya dijadikan sebagai koridor (batasan) tindakan atau perbuatan pemerintahan, akan tetapi juga berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan penilaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kepustakaan hukum tata negara disebutkan, bahwa ada dua konsep negara hukum yang selalu menjadi rujukan, yakni konsep negara hukum dalam artian "*rechtsstaat*" dan konsep negara hukum dalam artian "*rule of law*" di samping terdapat konsep negara hukum lainnya, seperti: "*socialist legality*", "nomokrasi Islam", dan "negara hukum Pancasila". Meskipun kedua konsep negara hukum ini pada arasnya sama, yakni ditujukan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dianggap menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuat sewenang-wenang (*willlekeur onredeljkheid*) serta perbuatan melanggar hukum yang menopang oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), akan tetapi latar belakang hukum yang menopang konsep negara hukum ini sangatlah berbeda-beda.

### 3. Negara Hukum Indonesia

Philipus M. Hadjon (1987: 75) menguraikan, bahwa dalam kepustakaan berbahasa Indonesia sudah sangat populer dikenal dengan penggunaan istilah negara hukum". Namun demikian, menurutnya masih tidak jelas bagi kita seperti apakah konsep negara hukum itu dan bahkan sering kali digaduhkan atau disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum dalam artian "*rechtsstaat*". Apakah memang konsep negara hukum sama dengan konsep "*rechtsstaat*" adalah merupakan suatu permasalahan. Istilah "*rechtsstaat*" sendiri mulai populer dan dikembangkan di Eropa sejak abad ke-17 dan mendapat pengakuan secara umum pada abad ke-19 meskipun pemikiran tentang ini sudah lama adanya. Adapun konsep "rule of law" mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey (1885) dengan judul "*Introduction to the study of the law of the Constitution*".<sup>36</sup>

Untuk memperjelas kedua konsep negara hukum tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan sejarah dan latar belakang Pengembangan kedua konsep negara hukum tersebut agar dapat diketahui dan dipahami dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan patokan penilaian

<sup>36</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta Prenamedia Group, 2016) Hal. 49-50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ukuran) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, diharapkan pula akan memberikan dasar bagi kita untuk menegaskan adanya suatu tatanan atau bangunan negara hukum Indonesia seperti apakah wujudnya dan seperti apakah paradigma negara hukum Indonesia itu. Selama ini, terdapat ketidakjelasan konsepsi negara hukum yang kita jadikan sebagai landasan atau kerangka dasar berbangsa dan bernegara. Menurut Aminuddin Ilmar, seharusnya dapat ditegaskan seperti apakah kerangka dasar negara hukum yang seharusnya dianut apakah bersandar kepada konsepsi *rechtsstaat* ataukah bersandar kepada konsepsi *rule of law* ataukah kita mempunyai konsepsi negara hukum sendiri, yakni negara hukum Indonesia. Kalau hal ini mau dilakukan, maka tentunya harus jelas pula seperti apa rujukan dasarnya dan apakah bersandar kepada kedua konsepsi negara hukum tersebut atau tidak sama sekali.

Adanya bangunan negara hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi negara kita belum sepenuhnya memperjelas konsepsi negara hukum yang di anut. Sebab, kalau hal itu dilakukan tentu saja akan memperjelas pula landasan atau kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan kita yang selama ini sering kali di rasakan belum bertumpu kepada konsepsi negara hukum. Walaupun sudah ditegaskan negara kita adalah negara hukum dan dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan juga harus berlandaskan atas hukum, namun perlu di rumuskan unsur- unsurnya seperti apa sehingga akan memperjelas tolok ukur kita. Dengan kata lain, adanya unsur- unsur negara hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia tentunya dapat dijadikan sebagai dasar berpijak bagi pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaannya sekaligus sebagai alat atau sarana untuk melakukan penilaian atau pengujian terhadap semua tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukannya.<sup>37</sup>

### B. Teori Otonomi Daerah

#### 1. Pengertian Otonomi

Konsep otonomi dalam asal kata diartikan sebagai undang-undang (*nomos*) sendiri (*autos*) sebagaimana di tegaskan oleh marzuki. Undang-undang itu sendiri dimaksudkan sebagai aturan yang isinya mengatur sehingga konsep otonomi dapat pula diartikan sebagai mengatur sendiri. Apa yang diatur dan bagaimana pengaturan itu dilakukan menempatkan konsep otonomi dapat digunakan dalam bergai keperluan sesuai konteksnya. Surianingrat menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan di daerah, otonomi diartikan sebagai mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>38</sup>

Otonomi Daerah terdiri atas dua kata yaitu otonomi dan daerah, otonomi berasal dari bahasa Yunani ( *autonomy* dan *nomous*). kata *autonomy* berarti sendiri dan *nomous* berarti hukum atau peraturan, maka otonomi berarti memiliki aturan sendiri sedangkan daerah berarti wilayah, jadi otonomi daerah secara etimologi ialah daerah yang memiliki peraturan sendiri.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid.*, h 50-51

<sup>38</sup> Faried Ali, *Study Kebijakan Pemerintah*, (Bandung PT Refika Aditama 2012), h. 151

<sup>39</sup> Abu Samah dan Ali bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru; STIE Lukman Edy, 2016), h. 1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1945  
 Sesungguhnya UU No. 1 Tahun 1945 yang ditetapkan pada 23 November 1945, tiga bulan setelah proklamasi, adalah undang undang tentang kedudukan komite Nasional indonesia daerah (KNID). Meskipun demikian undang- undang ini di pandang sebagai satu undang- undang tentang pemerintahan daerah di indonesia. Untuk memahami undang-undang tentang pemerintahan daerah di indonesia. Untuk memahami undang undang ini akan diberikan sedikit gambaran terlebih dahulu tentang komite nasional indonesia pusat (KNIP). Pasal IV aturan peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD 1945 di sahkan oleh PPKI tanggal 18 agustus 1945, PPKI juga menetapkan bahwa pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional, tanpa dibatasi apakah pada tingkat nasional saja, ataukah juga ke tingkat daerah.

Usaha komite nasional adalah membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita cita bangsa indonesia, dan didaerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum. Komite nasional dipusat memimpin dan memberikan petunjuk kepada komite komite nasional daerah. Dalam kenyataannya komite nasional indonesia daerah tidak sekedar membantu, melainkan secara nyata ikut menjalankan pemerintah daerah.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Max Boli Sabon, *Hukum Otonomi Daerah edisi kedua* ( Jakarta:UAJ 2011 ) h.79-80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut bagir manan, pemerintah daerah adalah satuan pemerintah teritorial tingkat lebih rendah dalam NKRI yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintah di bidang administrasi tertentu dibidang administrasi negara sebagai rumah tangganya.

Suatu daerah disebut daerah otonom, sedangkan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintah dibidang adminitrasi negara yang merupakan urusan rumah tangga disebut otonom. Cita-cita otonom daerah bukan sekedar tuntutan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, melainkan sebagai tuntutan konstituional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Dari segi materil otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip kesejahteraan dan sistem pemencaran kekuasaan menurut dasar negara berdasarkan hukum.<sup>41</sup>

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas - luasnya untuk

<sup>41</sup> Bagir Manan, *Menyongsong fajar Otonomi Daerah*, (Jogjakarta: Pusat Studi FH UII 2005) h.57

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang dianut Indonesia adalah negara kesatuan.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 8sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>43</sup>

### 3. Asas-asas Otonomi Daerah

#### a. Asas Desentralisasi

Menurut Joeniarto desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah

<sup>42</sup> Wasito Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*, jurnal Konstitusi, 2012 h. 746

<sup>43</sup> Penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangganya sendiri. Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Irawan Soejito, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 1 butir b, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkatan atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Pelaksanaan fungsi pemerintah, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan : (1) satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat; (2) satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien; (3) satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif; (4) satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>44</sup>

Mengetahui lebih lanjut mengenai desentralisasi dijelaskan tentang cirinya menurut Smith sebagai berikut:

- 1) Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom

<sup>44</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung :Nusa Media,2009),Cet ke1 h. 328-330

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual function*)
- 3) Penerima wewenang adalah daerah otonom
- 4) Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, Wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal
- 5) Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak
- 6) Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan kongkrit
- 7) Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki pemerintah pusat
- 8) Menunjukkan pola hubungan antara organisasi.

Tujuan desentralisasi berdasarkan kepentingan pemerintah daerah untuk mewujudkan politik yang berkualitas (*political equality*)<sup>45</sup>

**b. Asas Dekonsentrasi**

Menurut Amran Muslimin, dekontrasi ialah pelimpahan sebagai dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irwanto Soejito mengartikan, dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri. Menurut Joeniarto, dekontrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat

<sup>45</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta:Grasindo,2005) h.13

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang dapat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pasal 1 huruf (f), dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau Kepala Instansi *Vertikal* tingkat Susunan daerah pemerintah atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.<sup>46</sup>

#### c. Asas Tugas Pembantu

Tugas pembantuan merupakan tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat dan pemerintah lokal yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangga di tingkat atasnya. Tugas pembantuan dalam pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja. Pemerintah pusat yang tingkatnya lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga daerah yang tingkatnya lebih atas.<sup>47</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Daerah

Bagian ketiga Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Daerah. Pasal 21 menjelaskan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- 1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- 2) memilih pimpinan daerah

<sup>46</sup> Ni'matul Huda *Op.cit*, h.332-334

<sup>47</sup> Hanif Nurcholis, *Op.cit*, h.16



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) mengelola aparatur daerah
- 4) mengelola kekayaan daerah
- 5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- 6) mendapatkan bagi hasil dari sumber pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- 7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
- 8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan, Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- 1) melindungi masyarakat, menjaga pemersatuan kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan republik Indonesia
- 2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- 3) mengembangkan kehidupan demokrasi
- 4) mewujudkan keadilan dan pemerataan
- 5) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- 6) menyediakan fasilitas kesehatan
- 7) menyediakan fasilitas umum yang layak
- 8) mengembangkan sistem jaminan sosial
- 9) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- 10) mengembangkan sumberdaya produktif di daerah

<sup>48</sup> Samsul Wahidin *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013) h.607

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) melestarikan lingkungan hidup
- 12) mengelola administrasi kependudukan
- 13) melestarikan nilai budaya sosial
- 14) membentuk dan menerapkan peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangannya dan
- 15) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, di daerah dibentuk DPRD sebagai badan legislatif daerah pemerintahan daerah sebagai badan esekutif daerah pemerinthan daerah sebagai badan esekutif daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya (pasal 14). di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa, yang merupakan pemerintahan desa pasal (94) disini tampak perbedaan susunan pemerintah daerah, yaitu daerah provinsi, kabupaten, dan kota terdapat pemisah antara pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi esekutif dan DPRD yang melaksanakan fungsi legislatif. Sedangkan di Desa, hanya satu susunan pemerintahan daerah, yang disebut “pemerintahan Desa” yang didalamnya terdapat pemerintahan Desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengatur mengurus rumah tangga Desa yang bersangkutan. Meskipun demikian konsentrasi pelaksanaan fungsi BPD lebih merupakan badan legislatif desa pasal 104), yaitu :

- 1) Mengayomi adat istiadat

---

<sup>49</sup> Ibid, Samsul, h. 608

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Membuat peraturan Desa
- 3) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
- 4) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 4 UU No.23 tahun 2014 menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan di susun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.<sup>50</sup>

### C. Pemerintahan Daerah

#### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi terwujudnya tujuan negara. Pemerintahan diartikan sebagai segala hal yang berupa memerintah baik dalam hal kegiatan, urusan ataupun sebagainya

Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

<sup>50</sup> Max Boli Sabon, *Hukum Otonomi Daerah* Op.cit h. 139-140



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1945. Sedangkan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dan yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.<sup>51</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah, dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yang didalam hukum administrasi negara dikenal dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang layak.”<sup>52</sup>

Dalam kepustakaan hukum administrasi sangatlah jelas disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan ialah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara sehat dan wajar. Pemerintahan modern pada hakikatnya ialah bagaimana agar suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu dapat lebih mendorong terwujudnya

<sup>51</sup> Ibid h. 1

<sup>52</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 27

## 2. Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Sejak dianutnya konsepsi *welfare state* yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang undangan.<sup>53</sup>

Telah disebutkan bahwa AAUPB ini berkembang menjadi wacana yang dikajian para sarjana dan ini menunjukkan bahwa AAUPB merupakan konsep terbuka (*open begrip*). Sebagai konsep terbuka, ia akan berkembang dan disesuaikan dengan ruangan waktu dimana konsep ini berada. Berdasarkan penelitiannya, jazim hamidi menemukan pengertian Aupb sebagai berikut

- a. AAUPB merupakan nilai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum adminitrasi negara;
- b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya merupakan alat uji bagi hakim adminitrasi dalam menilai tindakan adminitrasi negara (yang berwujud penetapan /*beschiking* ) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak pengugat;

<sup>53</sup> Ridwan HR, *Hukum Admitrasi Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet 2018),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat;
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpecah dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagai asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.<sup>54</sup>

### 3. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Indonesia

Bagian kedua UU nomor 23 tahun 2014 ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 58 menguraikan:<sup>55</sup>

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas :
  - 1) Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
  - 2) Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
  - 3) Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif

<sup>54</sup> Ibid, h.235

<sup>55</sup> Sarman & Moehammad Taufik Makarao *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2011) h. 81



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara
- 5) Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- 6) Asas profesionalitas yaitu asas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- c. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantu.<sup>56</sup>

Menurut W.S Sayre Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan

<sup>56</sup> Siswanto Sunarno *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 81

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan Anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>57</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-undang dasar 1945, berdasarkan penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom (*streek and locale Rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan perwakilan Daerah.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Inu kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010)

<sup>58</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Op.Cit h.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, di daerah pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan pemerintahan daerah, dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Perubahan kedua Undang-Undang dasar 1945 tentang negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang undang.

Dalam pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara Provinsi, Kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang.

Demikian pula pasal 18B UUD 1945 dinyatakan bahwa negara mengakui menghormati satuan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang Negara juga mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*2-3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Kewenangan Pemerintah

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintah adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tentu, yakni tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni tindakan atau perbuatan hukum, yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan akibat hukum, (*het vermogen tot het verrichten van bee paalde rechshandelingen is handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strakken dat bepaalde rechtsvolgen ontstaan of teniet gaan*). Selanjutnya di kemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.<sup>60</sup>

Dalam konsep negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di kemukakan oleh huisman dalam buku Ridwan HR. Bahwa organ pemerintahan tidak dapat ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan,

##### a. Asas legalitas dan wewenang pemerintah

##### 1) Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*)

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi Negara-

<sup>60</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* Opcit.h.102

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara hukum dalam sistem kontinental.<sup>61</sup> Istilah asas legalitas juga dikenal dalam hukum pidana; *nullum dilectum sine praevia lege poenali* (tidak ada hukuman tanpa undang-undang), dan dikenal pula dalam hukum islam yang bertumpu pada ayat; *ma kaanu mu'adzibiina hatta nab'atsa rasuula*; “kami tidak menjatuhkan siksa sebelum kami mengutus seorang rasul” kemudian asas legalitas dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna, “*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*” (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang).

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum Tata negara dan hukum administrasi negara. Menurut Bagir manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plicthen*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

<sup>61</sup> Ridwan HR, *Hukum Admitrasi Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet 2018),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>62</sup>

Jimly Asshiddiqie menerangkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara dapat saja berpindah kepada lembaga lain karena pemberian mandat (*mandatory*) atau karena pelimpahan wewenang (*transfer of power*). Apabila suatu kewenangan dimandatkan kepada suatu lembaga lain untuk melaksanakannya atas nama pemberi mandat, maka lembaga pemberi mandat atau mandatory itu dapat saja menarik kembali mandatnya itu sewaktu-waktu dari lembaga penerima mandat. Akan tetapi, di dalam teori tentang pendelegasian, maka pelimpahan kewenangan dari suatu lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan secara mutlak.<sup>63</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang sistem keolahragaan nasional pada pasal 21 ayat (1) yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### 5. Kewenangan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan perkembangan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia serta di dukung pula dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat maka terbitlah undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Undang-undang ini adalah landasan hukum terbaru dalam pengaturan pemerintahan

<sup>62</sup> *Ibid* hlm. 99-100

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), Cet.Ke-3, h. 264

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 hadir dengan pengaturan yang lebih kompleks dan sistematis dalam pengaturan pemerintahan daerah. Dalam undang undang nomor 23 Tahun 2014 sudah dilakukan pemisahan antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa dan Pemilu Kepala Daerah.<sup>64</sup>

Adapun kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Kewenangannya meliputi pembinaan, pengembangan pelaksanaan dan pengawasan, yang dilaksanakan melalui:

- a. Pembinaan dan olahraga tradsisional asli kuantan singingi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama
- b. Penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional pada kegiatan kegiatan hari hari besar daerah
- c. Bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan daerah.

**D. Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi**

Adapun Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan singingi tertuang di dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>64</sup> Yusnani Hasyim, *Op.cit* h.37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tugas pokok dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional asli Kuantan Singingi pasal 4 ayat (1), yaitu: pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan, mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisi daerah dibidang olahraga berdasarkan ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan.<sup>65</sup>

Dalam hal ini, Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang dimana pemerintah pusat yang menaungi urusan kepemudaan dan olahraga adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Fungsi Dinas Pendidikan Dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam hal ini fungsi dari Dinas pendidikan dan Dinas pemuda olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada Pasal 4 peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- 2 Perencanaan dibidang pendidikan, pemuda dan Olahraga
- 3 Pengkoordinasian dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- 4 Pelaksanaan fasilitasi dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga

<sup>65</sup> Peraturan Bupati Kuantann Singingi Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Pembinaan, Pengembangan Dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 5 Pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan pemuda dan Olahraga
- 6 Pembinaan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- 7 Pengawasan di bidang pendidikan , dan olahraga
- 8 Pengendalian dan monitoring dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- 9 Pengevaluasian dan pelaporan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga
- 10 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>66</sup>

Pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian olahraga tradisional asli kuantan singingi. Tanggung jawab pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

1. pelaksanaan kebijakan
2. kordinasi pembinaan dan pengembangan dan
3. pelaksanaan kewenangan sesuai peraturan perundang undangan

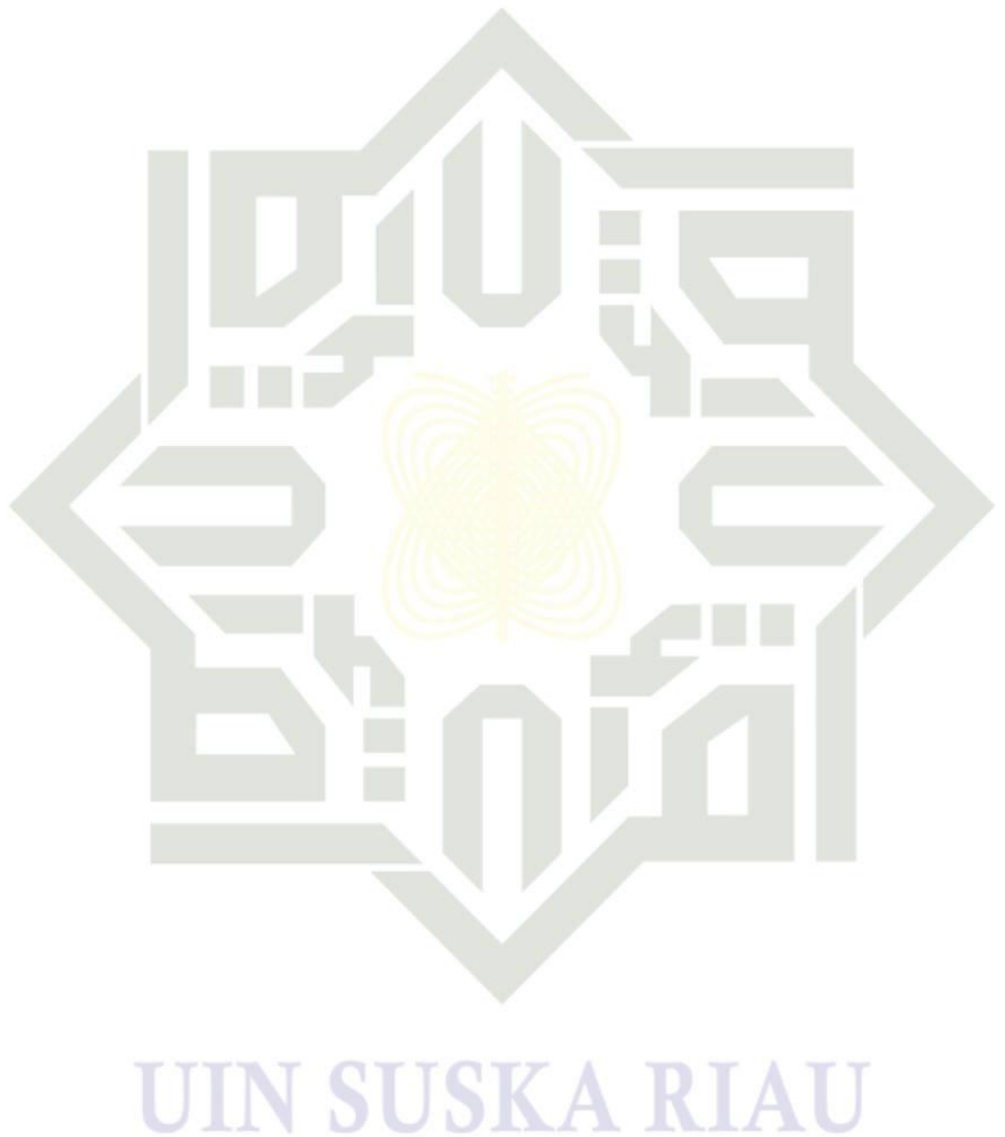
adapun jenis olahraga tradisional asli kuantan singingi yaitu:

- a. pacu enau
- b. sepak rago tinggi kopah
- c. silek pangean
- d. pacu perahu

Maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman Dinas dalam pelaksanan pembinaan, pengembangan dan pelestarian olahraga Tradisional asli kuantan Singingi

<sup>66</sup> Peraturan Bupati kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Tugas Dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk mengembangkan dan melestarikan olahraga Tradisional asli kuantan singingi pada tingkat Sekolah Dasar dan Menengah pertama di Kabupaten Kuantan Singingi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Setelah melakukan peniliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Tugas Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Dalam melakukan Pembinaan pengembangan dan pelestarian Olahraga Tradisional masih belum efektif. Dilihat dari perkembangannya, minat dan bakat dari siswa dan siswi Sekolah Dasar Negeri 019 dan Sekolah Dasar Negeri 019 Langsat Hulu pun masih sedikit. Banyak Sekolah Sekolah dan masyarakat luas yang belum mengetahui apa itu olahraga tradisonal, padahal sejatinya berolahraga guna mendapatkan jiwa dan raga yang sehat dan kuat. Olahraga tradisional juga meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal, mengurangi resiko terjadinya berbagai penyakit, yang Seperti tujuan dari olahraga utama dari olahraga Tradisional adalah untuk mengembangkan melestarikan olahraga tradisonal asli kuantan singingi.
2. Faktor yang penghambat Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan dan pengembangan dan pelestarian olahraga tradisional asli Kuantan Singingi diantaranya adalah; (i) faktor hukum; (ii) faktor sarana dan fasilitas; dan (iii) faktor masyarakat; serta (iv) faktor kebudayaan.



## B. Saran

Agar bisa diterapkan Tugas dari Dinas Pendidikan dan Dinas pemuda dan olahraga dalam melakukan pembinaan pengembangan pelestarian olahraga tradisional asli kuantan singingi peraturan bupati Nomor 61 Tahun 2019 di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi maka penulis memberikan saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 61 Tahun 2019 tentang pembinaan dan pengembangan, dan pelestarian olahraga tradisional asli kuantan singingi sangatlah bagus oleh karena itu disarankan dilaksanakan dan di sosialisasikan dengan maksimal.
2. Tumbuh dan berkembangnya olahraga tradisional di Sekolah Dasar Negeri 019 dan Sekolah Dasar Negeri 020 ikut di tentukan oleh guru olahraga. Oleh karna itu disarankan kepada guru, agar melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014)
- Samah dan Ali bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru; STIE Lukman Edy, 2016)
- Ajij Khamdani, *Olahraga Tradisional Indonesia* (Kalimantan Barat, PT Maraga Borneo Tarigas, 2018)
- Amnuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta Prenamedia Group, 2016)
- Amisa Ulhasni, *Pembinaan olah raga tradisional silat sikoka harimau damam*, jurnal patriot volume 3 No. 1, 2020.
- Asriansyah *Pengembangan Permainan Tradisional Untuk Melestarikan Budaya Bangsa Melalui Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar*, Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, 2018.
- Badan pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi 2019.
- Bagir Manan, *Menyongsong fajar Otonomi Daerah*, (Jogjakarta: Pusat Studi FH UII 2001)
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Fahed Ali *Study Kebijakan Pemerintah*, (Bandung PT Refika Aditama 2012)
- Feta Sofiana *permainan tradisional kuntulan didesa kalipancur kecamatan blado kabupaen batang jawa tengah* journal Of Sport Sciences and fitness 4.hlm
- Haif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (jakarta: Grasindo, 2005)
- Indera, dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2014)
- Intenkencana syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, jakarta: refika aditama, 2010)
- Jamarudin, *“Kebijakan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal publihu is licensed under a creative commons attribution.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Indrawan, *Olahraga sebagai sarana pemersatu bangsa dan upaya perdamaian dunia* universitas pembangunan nasional vetrean jakarta.h.69
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014)
- Juliandiyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Grup, 2012)
- Komarudin, “*Peran Guru Pendidikan Jasmani Dalam Sistem Pembangunan Dan Pembinaan Olahraga Di Indonesia*” *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, vol. 11 No. 1, april 2015.
- Max Boli Sabon, *Hukum Otonomi Daerah edisi kedua* ( Jakarta:UAJ 2011 )
- Nimatul Huda *Hukum Tata Negara* (jakarta:Rajawali Pers 2016)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pemerintahan Daerah* ,(Bandung :Nusa Media,2009)
- Oktaria Kusumawati “*Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Peningkatan Kemampuan Gerak Dasar Siswa Sekolah Dasar Kelas Bawah*” *jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar*, vol.4 No.2 oktober 2017.
- Pasal 26 Undang-undang Tentang Olahraga Nasional Nomor 3 Tahun 2005
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka Kuantan Singingi Regency In Figures 2019*, (Kuansing, BPS, 2019)
- Penjelasan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati kuantan Singingi No 61 Tentang pembinaan, pengembangan Olahraga Tradisional Kuansing Tahun 2019
- Pieter Mahmud Marzuki, *Metode penelitian hukum*,( Jakarta: Kencana, 2005)
- Ridwan HR, *Hukum Admitrasi Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, cet 2018)
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*
- Samsul Wahidin *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013)
- Saman & Moehammad Taufik Makarao *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2011)
- Siswanto sunarno *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (jakarata :sinar Grafik,2006)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaaan Nasional

Wasito Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia*, jurnal Konstitusi, 2012.

Yusnani Hasyim, *Hukum Pemerintah Daerah* (Depok Rajawali Pers 2018)

Yusnani Hasyizoen, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017)

Zamuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

\_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional Asli Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 (Di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)"* yang ditulis oleh :

Nama : Syahri Handrik Juni Pratama  
NIM : 11627103870  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Nurnasrina, SE., M.Si**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Lysa Angraini, SH., MH**

Penguji II  
**H. Nuraini Sahu, SH., MH**

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1023

UIN SUSKA RIAU



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SYAHRI HANDRIK JP  
 NIM : 11627103870  
 Jurusan : ILMU HUKUM  
 Judul : TUGAS DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PEMUDA DAN  
 OLAHRAGA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN  
 PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN OLAHRAGA  
 TRADISIONAL ASLI KUANTAN SINGINGI  
 BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 61  
 TAHUN 2019 (Di Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo  
 Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Pembimbing : Dr. Abu Samah, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010

Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 September 2020

Un. 04/F.I/PP.00.9/5925/2020

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : syahri handrik j.p

NIM : 11627103870

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Semester : IX (Sembilan)

Lokasi : Desa Langsung Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tugas Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan olahraga dalam melakukan pembinaan pengembangan pelestarian olahraga tradisional asli kuantan singingi berdasarkan peraturan bupati no 61 Tahun 2019 di desa langsung hulu kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

1. Disampaikan kepada seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Disampaikan kepada seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptspk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptspk.kuansing.go.id

TELUK KUANTAN

## REKOMENDASI

Nomor : 331/DPMPTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35894 Tanggal 19 OKTOBER 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **SYAHRI HANDRIK JP**  
: 11627103870  
: ILMU HUKUM  
: FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
: S1  
: PEKANBARU  
: "TUGAS DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL ASLI KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO 61 TAHUN 2019 DI DESA LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"  
: **DESA LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Kuantan Singingi,

**MARDANSYAH S, Sos. MM**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 19750806 200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Dilarang mengutip atau menyalin seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Untuk melakukan Penelitian di UIN Suska Riau, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/35894  
TENTANG



1.04.02.01

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un 04.15.18.PP.00.9/5925/2020 Tanggal 28 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

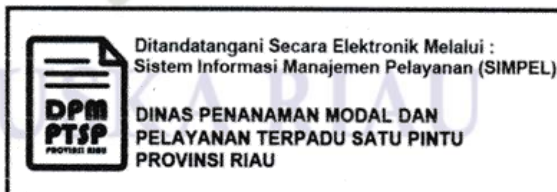
1. Nama : **SYAHRI HANDRIK J.P**
2. NIM / KTP : **11627103870**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TUGAS DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN OLAHRAGA TRADISIONAL ASLI KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO 61 TAHUN 2019 (DI DESA LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**
7. Lokasi Penelitian : **DESA LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

sejalan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2020



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



SYAHRI HANDRIK JUNI PRATAMA, lahir di Desa Langsat Hulu, pada tanggal 25 Juni 1998 merupakan anak pertama dari 5 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Teguh Pranoto dan ibunda Afri Yanti. Pada tahun 2003, penulis mulai mengecap dunia pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kenari Langsat Hulu. Lulus pada tahun 2004. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 020 Langsat Hulu. Lulus pada tahun 2010. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 5 Benai 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Tamat dari SMP Negeri 5 Benai tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK Pesantren Teknologi Riau 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 berkat restu dan do'a kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XIX di Desa Dayo, Kecamatan Tandun, atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Tugas Dinas Pendidikan Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Tradisional asli Kuantan Singingi (di Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya) di bawah bimbingan langsung Bapak Dr. Abu Samah, S.H.,M.H. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 25 Maret 2021, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, salam sukses untuk kalian para pejuang Sarjana Hukum.